

SKANDAL PANAMA PAPERS DALAM BINGKAI MEDIA

(Analisis Framing Model Pan Kosicki Pemberitaan Keterlibatan Pejabat

Negara dalam Skandal Panama Papers pada Majalah Tempo No. 4509 Edisi 25

April- 1 Mei 2016)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Disusun oleh :

ANIS AMALIA

NIM : 12730020

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anis Amalia
NIM : 12730020
Prodi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : *Public Relations*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 18 Januari 2017

Yang menyatakan,



Anis Amalia
NIM. 12730020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING
FM-UINSK-PBM-05-02/RO

Hal : Skripsi

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Anis Amalia
NIM : 12730020
Prodi : ILMU KOMUNIKASI
Judul :

SKANDAL PANAMA PAPERS DALAM BINGKAI MEDIA
(Analisis Framing Model Pan Kosicki Pemberitaan Keterlibatan Pejabat Negara dalam Skandal Panama Papers pada Majalah Tempo No. 4509 Edisi 25 April-1 Mei 2016)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara/i segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Januari 2016
Pembimbing

Rika Lusri Virga,S.IP.,M.A
NIP. 19850914 201101 1 014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DSH/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : SKANDAL PANAMA PAPERS DALAM BINGKAI MEDIA (Analisis Framing Model Pan Kosicki Pemberitaan Keterlibatan Pejabat Negara dalam Skandal Panama Papers pada Majalah Tempo No. 4509 Edisi 25 April- 1 Mei 2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANIS AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 12730020
Telah diujikan pada : Senin, 30 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Rika Lusri Virga, S.IP., M.A
NIP. 19850914 201101 2 014

Penguji I

Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.
NIP. 19730423 200501 1 006

Penguji II

Diah Ajeng Purwani, S.Sos, M.Si
NIP. 19790720 200912 2 001

Yogyakarta, 30 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

DEKAN



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

*Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

*“Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is
the little voice at the end of the day that says*

‘I’ll try again tomorrow’”

-Marry Anne Radmacher-



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**SKANDAL PANAMA PAPERS DALAM BINGKAI MEDIA (*Analisis Framing Model Pan Kosicki Pemberitaan Keterlibatan Pejabat Negara dalam Skandal Panama Papers pada Majalah Tempo No. 4509 Edisi 25 April- 1 Mei 2016*)**”. Peneliti menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Siantari Rihartono, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bunda Rika Lusri Virga, S.IP., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti selama mengerjakan skripsi.
4. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
5. Bapak Bibit Widodo dan Mamak ‘Menik’ Sukiyem, cinta pertama peneliti, yang senantiasa memberikan seluruh kasih sayang dan motivasi kepada peneliti.
6. Landung Restu Pambudi, adik, partner sekaligus rival apapun di rumah.
7. Sahabat ‘Kumpul Kebo’ kesayangan ; Mila ‘Oneng’, Ika ‘Kasoh’, Ratna, dan ‘Bu Nyai’ Usria, keluarga kedua di Jogja.
8. Sahabat ‘Ulala’ ; Beb Izta, Beb Cicu, dan Ifa yang selalu kompak dan ceria.
9. Kawan-kawan IKOM A 2012 yang selalu memberikan semangat positif.

10. Sahabat- sahabat PMII Rayon Humaniora Park, Korp Blangkon (Babe Yanto, Hiban, Hamdi, Man, Galuh, Rudi, Hendris, dll), Korp Gareng, Korp Arimaja, Korp Pandhawa, Korp Semar, Korp Karpet, Korp Palang, Korp RI, Korp Arimbi, Korp Senopati, Korp Gamelan, dan Korp Hanoman.
11. Mas Achmad Mi'yarul Ilmi, partner seperjuangan yang selalu menyemangati layaknya sahabat, melindungi seperti saudara, dan mengasihi layaknya keluarga. *Thanks for being apart of my life.*
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan semua pihak di atas.

Kritik dan saran untuk perbaikan dan pengembangan keilmuan sangat diharapkan oleh peneliti.

Wallahulmuafiq ilaa aqwamiththoriq

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Peneliti,

Anis Amalia
NIM. 12730020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PESEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Landasan Teori	16
1. Konstruksi Sosial	16
2. Analisis Framing	18
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22

2. Unit Observasi dan Unit Analisis	22
3. Jenis Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	26
6. Metode Keabsahan Data	27
BAB II GAMBARAN UMUM	30
A. Sejarah Tempo	30
B. Kepemilikan dan Keredaksian Majalah Tempo.....	35
C. Karakteristik Majalah Tempo	38
1. Reguler	38
2. Edisi Khusus	38
3. Proses Pembuatan Berita dan Kebijakan Redaksional ...	38
4. Tempo dan Jurnalisme Investigasi	40
D. Pemberitaan tentang Panama Papers.....	42
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
A. Analisis Framing Berita Majalah Tempo	46
1. Analisis Framing Berita 1	46
2. Analisis Framing Berita 2.....	68
3. Analisis Framing Berita 3.....	83
4. Analisis Framing Berita 4.....	94
5. Analisis Framing Berita 5.....	99
B. Pembahasan Hasil Analisis Framing Berita Majalah Tempo.....	113

BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya	14
Tabel 2 : Definisi <i>Framing</i>	19
Tabel 3 : Unit Observasi	23
Tabel 4 : Unit Analisis Penelitian	24
Tabel 5 : Ringkasan Perjalanan Tempo	33
Tabel 6 : Analisis Struktur Sintaksis Berita 1	47
Tabel 7 : Analisis Struktur Skrip Berita 1	55
Tabel 8 : Analisis Struktur Retoris Berita 1	66
Tabel 9 : Analisis Struktur Sintaksis Berita 2	68
Tabel 10 : Analisis Struktur Skrip Berita 2	75
Tabel 11 : Analisis Struktur Retoris Berita 2	81
Tabel 12 : Analisis Struktur Sintaksis Berita 3	83
Tabel 13 : Analisis Struktur Skrip Berita 3	89
Tabel 14 : Analisis Struktur Retoris Berita 3	92
Tabel 15 : Analisis Struktur Sintaksis Berita 4	94
Tabel 16 : Analisis Struktur Skrip Berita 4	96
Tabel 17 : Analisis Struktur Retoris Berita 4	98
Tabel 18 : Analisis Struktur Sintaksis Berita 5	99
Tabel 19 : Analisis Struktur Skrip Berita 5	106
Tabel 20 : Analisis Struktur Retoris Berita 5	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Cover Majalah Tempo edisi 25 April- 1 Mei 2016.....	6
Gambar 2 : Komposisi Kepemilikan Saham Tempo.....	37
Gambar 3 : Kutipan Judul dan Lead Berita.....	46
Gambar 4 : Foto PLTU Bengkayang pada Berita 1	64
Gambar 5 : Foto Luhut di Tambang Perusahaannya pada Berita 1	64
Gambar 6 : Foto Temuan Berkas dalam Panama Papers yang Berkaitan dengan Luhut pada Berita 1	65
Gambar 7 : Judul dan lead berita 2.....	68
Gambar 8 : Tambang Batubara PT Toba Sejahtra	81
Gambar 9 : Berita 3. Wawancara Tempo dengan Luhut	83
Gambar 10 : Foto Luhut saat Diwawancara oleh Tempo	92
Gambar 11 : Kronologi keterkaitan Luhut dengan Mayfair International Ltd.	94
Gambar 12 : Foto orang Indonesia yang terkait Panama Papers	110

ABSTRACT

Disclosure of Panama Papers documents by International Consortium Investigative Journalists (ICIJ) caused a lot of media preaching about the involvement of state official in the scandal of tax irregularity. Tempo is the only one media from Indonesia which joined in the investigation. Well-known as a media which respect the integrity, Tempo choose a different perspective than other media in constructing these affair.

This research observes how the construction of Tempo in case of involvement of official state's in Panama Papers scandal. This research done by using framing analysis method by Pan Kosicki in Tempo Magazine edition of 25th April - 1st May 2016. The theory used in this research is a social reality construction theory.

The result shows that construction of Tempo Magazine in case of involvement of state official in Panama Papers scandal is; Tempo constructe a reality that Luhut Binsar Pandjaitan is an state official guilty named in the Panama Papers document. Luhut and the other public officials constructed that they were evasive the allegations. The inclusion of a legal basis in the form of legislation contains message that state officials which the name noted in Panama papers document has committed an offense in the form of tax irregularation.

Construction built by Tempo in Panama Papers reporting scandals involving state officials are more provocation. This news tried to lead the audience to not accept government policies that seem silent in response to the case. The message of Panama Papers don't provide adequate portion of the fundamental things about the practice of the establishment of offshore companies. There are things that are not covered by Tempo, such as where that can be done, which doesn't violate the law, which is classified as a violation of law, why it was done, how and by whom. So that the public can make a guess if they are named in Panama Papers guilty or at least they have bad intentions.

Keywords : panama papers, framing analysis, social reality construction, media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian global yang sangat dinamis dan rawan mengalami krisis memaksa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk berupaya adaptasi agar perekonomian di negaranya tetap stabil. Peningkatan sumber-sumber pendapatan negara merupakan sebuah keharusan. Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kini menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup. Dalam kaitan ini, optimalisasi pendapatan negara menjadi salah satu opsi yang patut untuk dilakukan dengan segera. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah dan strategi optimalisasi, baik dalam hal kebijakan (*policy measures*) maupun administratif (*administrative measures*) terkait pendapatan negara.

Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah pajak. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (1979) adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor pemerintah, yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Ray M. Sommerfeld (1983), pajak adalah sumber dana yang di transfer dari pihak pribadi kepada sektor publik, berdasarkan kriteria yang telah di

tetapkan sebelumnya, tanpa menerima keuntungan timbal balik, dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian negara dan tujuan sosial.

Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuannya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak semaksimal mungkin. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan dalam perpajakan.

Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak adalah dengan mendirikan perusahaan yurisdiksi bebas pajak (*offshore*) di negara-negara bebas pajak. Seperti yang ramai menjadi sorotan media-media massa di dunia pada awal April 2016, yakni kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa yang mengungkap kepemilikan perusahaan-perusahaan *offshore* yang dirahasiakan.

Media memiliki peranan penting dalam penyebaran pemberitaan skandal tersebut. Pemberitaan skandal tersebut menyebar secara luas ke seluruh penjuru dunia dan memberikan pengaruh pada khalayak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Louis Althusser menulis bahwa media, dalam hubungannya dengan kekuasaan menempati posisi strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan, merupakan

bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological state apparatus*). Akan tetapi, pandangan Althusser tentang media ini dianggap Antonio Gramsci mengabaikan resistensi ideologis dari kelas ter subordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsci, media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (*the battle ground for competing ideologies*). (Sobur, 2012: 30).

Dari kedua pandangan tokoh di atas, dapat dipahami bahwa, media tidak selalu dan selamanya obyektif dalam menyampaikan informasi. Media massa bukanlah suatu institusi bebas dan independen. Media juga terikat dengan kepentingan pemilik modal, keberlangsungan pekerjaan dan sebagainya. Hal inilah yang menuntut khalayak untuk selalu kritis dalam membaca pemberitaan oleh media.

Kasus penyimpangan pajak berskala internasional tentunya menarik media baik cetak maupun online untuk melakukan pemberitaan. Media massa berusaha melakukan kontrol terhadap berbagai persoalan yang timbul, termasuk juga skandal Panama Papers. Media tentunya akan memberikan perhatian yang lebih terhadap skandal tersebut, karena kasus tersebut bersangkutan dengan kesejahteraan negara.

Kolom Investigasi situs berita online *tempo.co*, menyebutkan bahwa dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana 12 kepala negara (mantan dan yang masih menjabat) memiliki perusahaan yurisdiksi bebas pajak (*offshore*) yang dirahasiakan. Dan setidaknya ada 128 politikus dan

pejabat publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini. Mereka terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens*). Dokumen milik firma hukum yang berbasis di Panama tersebut kemudian disebut sebagai Panama Papers.

“Dokumen tersebut adalah milik sebuah firma hukum bernama Mossack Fonsseca, yang telah beroperasi selama hampir 40 tahun dan memiliki rincian lebih dari 214 ribu entitas perusahaan *offshore* yang terhubung ke beberapa orang di lebih dari 200 negara dan wilayah. Firma hukum ini berbasis di Panama, dan mempunyai kantor cabang di Hongkong, Zurich, Miami dan 35 kota lain di seluruh dunia.

Data yang bocor berisi informasi sejak 40 tahun lalu, sejak 1977 sampai awal 2015. Keberadaan dokumen ini memungkinkan publik untuk mengintip bagaimana dunia *offshore* bekerja, bagaimana uang gelap mengalir di dalam dunia fina

nsial global secara rahasia, mendorong lahirnya banyak modus kriminalitas dan merampok uang negara dari pajak yang tak dibayarkan.” (Investigasi, tempo.co/panama)

Kebanyakan jasa yang ditawarkan perusahaan *offshore* tidak melanggar hukum, jika digunakan oleh warga negara yang taat hukum. Namun dokumen ini menunjukkan bagaimana bank, kantor pengacara dan pelaku dunia usaha kerap tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan klien mereka tidak terlibat korupsi, pelarian pajak atau kegiatan kriminal lainnya.

Berita seputar temuan Panama Papers merupakan salah satu contoh media dalam menerapkan ideologi yang mereka anut melalui pemberitaan-pemberitaannya. Setiap berita yang dimuat oleh media merupakan

konstruksi realitas yang dikemas sesuai kebijakan masing-masing surat kabar. Bagaimana sebuah media mengambil sikap atas terjadinya sebuah peristiwa sebenarnya dapat kita lihat dari berita-berita yang mereka sajikan kepada publik.

Saat ini, tanpa disadari media perlahan membentuk pola pikir masyarakat. Strategi repitisi terhadap suatu pemberitaan tentu saja bermaksud menggiring masyarakat agar mengingat informasi tertentu. Bukan hanya mengingat, akan tetapi masyarakat disuguhkan perspektif tertentu dalam memandang realitas. Apa yang digambarkan oleh media bukan merupakan gambaran sebenarnya, akan tetapi merupakan penggambaran apa yang telah dilihat dan diamati oleh media kemudian menambahkan atau mengurangi berita tersebut. Apabila berita yang dimuat tidak sesuai lagi dengan fakta, maka berita tersebut masuk ke dalam berita yang mengandung kebohongan.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 11:

نَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَأْسَاءِ الْعُصْبَةِ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آثَرٍ

مَتَّهِمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kami. Tiap-tiap seseorang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu. Dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, baginya azab yang besar.”*(QS. An-Nur : 11)

Dari ayat di atas, peneliti dapat berpendapat bahwa berita yang diungkapkan oleh seseorang belum tentu benar apa adanya. Kebenaran

dari suatu berita seharusnya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Bagi para penyebar berita bohong tersebut akan mendapat dosa dari apa yang telah diperbuatnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Eriyanto (2012) bahwa apa yang khalayak tahu tentang realitas sedikit banyak bergantung pada bagaimana media menggambarkannya.

Pemberitaan oleh Tempo terkait skandal Panama Papers ini berujung pada terungkapnya nama Luhut Binsar Panjaitan, terkait dalam dokumen firma hukum yang bocor itu. Pada saat itu ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Bahkan Tempo menuliskan berita ini sebagai laporan utama dalam rubrik Investigasi pada Majalah Tempo No. 4509 Edisi 25 April-1 Mei 2016.

Berikut adalah cover majalah Tempo yang membahas tentang terkaitnya nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam Panama papers.

Gambar 1.

Cover Majalah Tempo Edisi 25 April-1 Mei 2016



(sumber : majalah.tempo.co)

Dan berikut ini adalah kutipan dalam salah satu artikel yang membahas tentang keterkaitan Luhut dalam Panama Papers.

“Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tercantum di Panama Papers. Dia disebut sebagai Direktur Mayfair International Ltd, perusahaan cangkang di Republik Seychelles, negara suaka pajak di Afrika. Penelusuran Tempo menemukan jejak-Mayfair dan perusahaan milik Luhut-di sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia” (Majalah Tempo No. 4509, hal. 92)

Selain nama Luhut Binsar Pandjaitan, Tempo juga menyebutkan beberapa nama pejabat publik lain di Indonesia yang terkait dengan skandal tersebut.

“Di Tanah Air, selain Luhut, pejabat negara yang namanya muncul dalam Panama Papers antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Airlangga Hartarto dan Johnny G. Plate. Lalu ada juga Heru Lelono, anggota staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Edi Yosfi, pengusaha yang dekat dengan petinggi Partai Amanat Nasional.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mewajibkan semua pejabat negara melaporkan harta kekayaannya. Undang-undang tersebut menyebutkan ada sanksi administratif bagi pelanggarnya. Dari penelusuran *Tempo*, Luhut, Harry, Airlangga, Heru dan Johnny tak melaporkan keterkaitan mereka dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak.”(Majalah Tempo, No 4509, hal 93)

Hal ini menjadi menarik perhatian ketika seorang pejabat publik terlibat dalam skandal yang luar biasa, mendorong peneliti untuk menganalisa bagaimana media membingkai berita tentang keterlibatan pejabat publik dalam skandal Panama Papers tersebut.

Pemilihan media cetak Majalah Tempo adalah karena media tersebut terkenal dengan independensinya, selain itu Tempo merupakan satu-satunya media dari Indonesia yang terlibat dalam investigasi dokumen Panama Papers tersebut, bersama organisasi wartawan global, *International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)*, sebuah koran dari Jerman *Süddeutsche Zeitung* dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia. ICIJ sendiri terdiri dari 370 jurnalis dari 76 negara. (Investigasi, tempo.co/panamapapers)

Media massa memiliki peran strategis, sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara serempak di antara khalayak yang sedang menggunakan media tersebut. Pada dasarnya, media massa memiliki fungsi penghantar dalam menyebar berbagai macam pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum dan murah, hubungan antara pengirim dan penerima sama, serta mampu menjangkau lebih banyak orang daripada institusi lainnya (McQuail, 2011: 51)

Dalam kurun waktu satu bulan peneliti mengamati bahwa media massa begitu banyak menyajikan dan memproduksi berita mengenai skandal Panama Papers kepada khalayak. Derasnya pemberitaan terhadap skandal Panama Papers menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana Tempo membingkai berita tersebut. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa apa yang disajikan oleh media tidak terjadi secara

kebetulan. Pemilihan fakta yang ditonjolkan, sudut pandang, serta cara memposisikan suatu objek, didasari oleh berbagai hal yang akan diteliti melalui penelitian ini.

Materi berita seputar keterlibatan nama pejabat negara di Indonesia dalam Panama Papers menjadi fokus utama dalam penelitian ini, sebagai bahan untuk mengungkap bingkai yang dibangun oleh Majalah Tempo dalam waktu tertentu terhadap bagaimana fakta-fakta tentang pejabat negara yang terlibat dalam skandal Panama Papers dikonstruksikan dalam sebuah pemberitaan, yang bertujuan memberikan pemaknaan kepada pembaca dalam mengonsumsi berita yang disajikan. Konstruksi tersebut penting untuk diketahui karena pembingkai dalam pemberitaan akan mampu mempengaruhi persepsi publik dalam memandang suatu fenomena sebagai hasil konstruksi media.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan menganalisis framing keterlibatan pejabat negara dalam skandal Panama Papers dalam pemberitaan di media cetak Majalah Tempo edisi 25 April- 1 Mei 2016. Penelitian ini berjudul : **Skandal Panama Papers dalam Bingkai Media (Analisis Framing model Pan Kosicki Pemberitaan Keterlibatan Pejabat Negara dalam Skandal Panama Papers pada Majalah Tempo No. 4509 Edisi 25 April- 1 Mei 2016)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah; Bagaimana Majalah Tempo

Membingkai Pemberitaan tentang Keterlibatan Pejabat Negara dalam Skandal Panama Papers ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai oleh Majalah Tempo terhadap pemberitaan tentang keterlibatan pejabat negara dalam Skandal Panama papers.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan peneliti terutama yang terkait dengan analisis *framing*. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang positif bagi akademisi, khususnya untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi dan mampu menjadi referensi tambahan mengenai analisis *framing* di media massa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan kontribusi kepada praktisi media, bagaimana konstruksi pesan yang dilakukan oleh media sehingga efek yang dihasilkan oleh khalayak sesuai dengan tujuan media.

- 2) Memberikan pengetahuan kepada pembaca, bagaimana membingkai suatu fakta.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian merupakan landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan harus berdasar pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya, untuk memberikan komparasi terkait penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Berikut hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat peneliti.

Pertama, skripsi Tanti Setyaningsih, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Skripsi tersebut berjudul “*Konstruksi Kepemimpinan JOKOWI di Media Cetak (Analisis Framing Pemberitaan pada Liputan Khusus Satu Tahun Kepemimpinan JOKOWI Sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi 14-18 Oktober 2013)*” .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frame Kompas terkait pemberitaan liputan khusus satu tahun kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah framing dengan menggunakan model Pan dan Kosicki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Kompas menilai sikap kepemimpinan Jokowi menuju pada kepemimpinan birokrasi yang

professional. Jokowi banyak diberitakan sebagai pemimpin yang melayani rakyat dan dekat dengan rakyat. Selain itu, Jokowi mempunyai gaya kepemimpinan yang demokratis dan transformatif.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada model framing yang digunakan, yakni model Pan dan Kosicki, sedangkan perbedaannya terletak pada nama media yang dianalisis. Penelitian sebelumnya menggunakan SKH Kompas, sedangkan penelitian ini menggunakan Majalah Tempo.

Kedua, skripsi Megafirmawanti Lasinta, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Skripsi dengan judul “*Konstruksi Media Online dalam Sengketa Verifikasi Partai Politik (Analisis Framing Tempo.co dan Viva.co.id Pada Pemberitaan Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari-31 Maret 2013)*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi media *online tempo.co* dan *viva.co.id* edisi 1 Januari – 31 Maret 2013 dalam pemberitaan sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang dalam Pemilu 2014. Dalam penelitian tersebut menggunakan analisis *framing* model Pan Kosicki. Kesimpulan dari penelitian tersebut berdasarkan analisis menggunakan model Pan Kosicki adalah *Tempo.co* terlihat berpihak kepada PBB karena adanya ketidakobjektifan dari tempo sebagai sebuah media. Sedangkan *viva.co.id* terlihat objektif dibandingkan dengan tempo.co. yakni dengan tidak melakukan pemberitaan yang memihak.

Persamaan penelitian terletak pada model framing yang digunakan, yakni model Pan dan Kosicki, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis media yang diteliti yakni media online dan media cetak.

Ketiga, skripsi Gema Mawardi, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dengan judul skripsi “*Pembingkaiian Berita Media Online (Analisis Framing berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana *framing* media dalam menyampaikan mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar dan memaparkan sejauh mana pengaruh kepemilikan media terhadap objektivitas pemberitaan dan netralitas media dalam menyampaikan berita. Penelitian tersebut menggunakan analisis *framing* model Pan Kosicki. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah pengaruh pemilik media memberikan dampak pada keberpihakan pemberitaan oleh media. *Framing* yang dilakukan *mediaindonesia.com* terhadap berita mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar sangat berpihak pada kepentingan pemilik media, sementara *framing* yang dilakukan *vivanews.com* masih menunjukkan usaha media untuk melakukan pendekatan pada objektivitas dalam melakukan pemberitaan.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada model framing yakni sama-sama menggunakan model Pan dan Kosicki, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis media yang diteliti. Penelitian

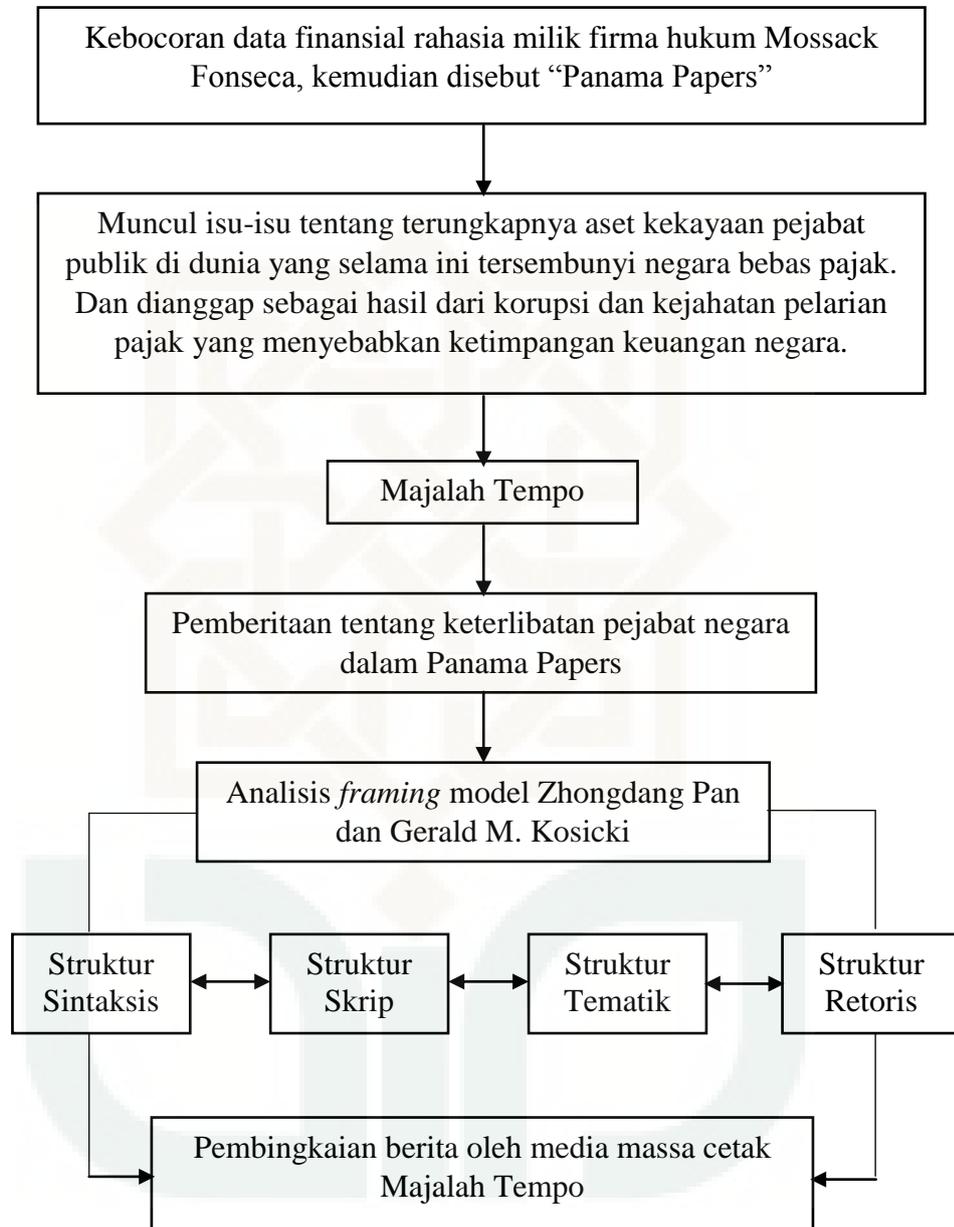
sebelumnya menggunakan media online, sedangkan penelitian ini menggunakan media cetak.

Tabel. 1
Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

	Subjek	Objek	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data
Tanti Setyaningsih	Surat Kabar Harian <i>Kompas</i>	Berita Liputan Khusus Kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta	Dokumentasi	Deskriptif analisis dengan Framing model Pan dan Kosicki dan teori Kepemimpinan
Megafirma wanti Lasinta	Tempo.co dan Viva.co.id	Berita Verikasi Partai Politik Partai Bulan bintang	Dokumentasi	Deskriptif kualitatif dengan Framing model Pan dan Kosicki dan Konstruksi Sosial
Gema Mawardi	Media Online mediaindonesia.com dan vivanews.com	Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar	Dokumentasi	Deskriptif Kualitatif dengan Analisis Framing Model Pan dan Kosicki dan Komunikasi Politik Media
Anis Amalia	Media cetak Majalah Tempo	Berita keterlibatan pejabat negara dalam skandal Panama Papers	Dokumentasi	Deskriptif Kualitatif dengan Analisis Framing Model Pan dan Kosicki

(sumber : Oleh peneliti)

E. Kerangka Pemikiran



(sumber : oleh peneliti)

F. Landasan Teori

1. Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial dalam kajian keilmuan komunikasi menjadi sesuatu yang mengiringi perkembangan keilmuan tersebut, terlebih kajiannya tentang media massa modern. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui sebuah karya berjudul *“The Social Construction of Reality, a Trestise in the Sociological of Knowlegde”*. Seperti yang dikutip oleh Bungin (2011: 193), Berger dan Luckman menggambarkan proses konstruksi sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Berger dan Luckman menjelaskan, institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektifitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh oranglain yang mempunyai definisi subjektif yang sama. Bungin (2011: 195)

Secara sederhana, konsep konstruksi sosial seperti yang dipaparkan Berger dan Luckman, bahwa pada tingkat generalisasi yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang

universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi makna pada berbagai bidang kehidupan.

Diantara proses individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu terdapat proses dialektika yang terjadi melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Bungin (2011: 195). Fans M. Parera dalam Berger dan Luckman (1990:xx) sebagaimana dikutip oleh Bungin juga turut ambil bagian dalam menjelaskan proses dialektika tersebut, dialektika berlangsung dalam tiga momen simultan yaitu :

- a) *Eksternalisasi*, penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia.
- b) *Objekifikasi*, interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusinalisasi.
- c) *Internalisasi*, proses yang mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

Parera juga menambahkan, tiga momen itu memunculkan suatu proses konstruksi sosial yang dilihat dari segi asal mulanya merupakan hasil ciptaan manusia, yaitu buatan interaksi-interaksi subjektif. Bungin (2011 : 197-198). Jika konstruksi sosial adalah konsep, kesadaran umum dan wacana publik, maka menurut Gramsci sebagaimana dikutip Sugiono dalam Bungin (2011: 196)

negara melalui alat pemaksa, seperti birokrasi, administrasi maupun militer ataupun melalui supremasi terhadap masyarakat dengan mendominasi kepemimpinan moral intelektual secara kontekstual. Kondisi hegemoni ini menurut Bungin berkembang menjadi hegemoni kesadaran individu pada setiap warga masyarakat, sehingga wacana yang diciptakan oleh negara akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai akibat hegemoni.

2. Analisis Framing

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2002:76). Proses pembentukan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.

Konsep framing dalam studi media banyak mendapat pengaruh dari lapangan psikologi dan sosiologi. Pendekatan psikologi terutama melihat bagaimana pengaruh kognisi seseorang dalam membentuk skema tentang diri, sesuatu, atau gagasan tertentu. Sementara dari sosiologi, konsep framing dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman. Menurut Goffman dalam Eriyanto, manusia pada dasarnya

secara aktif mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan pengalaman hidup ini agar mempunyai arti atau makna.

Berikut definisi framing menurut beberapa tokoh:

Tabel. 2
Definisi Framing

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-

	<p>peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.</p>
<p>David E. Snow dan Robert Sanford</p>	<p>Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.</p>
<p>Amy Binder</p>	<p>Skema intepretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.</p>
<p>Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki</p>	<p>Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.</p>

(Sumber: Eriyanto, 2002:77-79)

Secara sederhana, *framing* dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Framing ada karena sudut pandang atau cara melihat setiap individu (media) yang berbeda.

Ada dua aspek penting dalam *framing*. *Pertama*, memilih fakta atau realitas. Aspek ini mengasumsikan bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Selalu ada kemungkinan dalam memilih fakta, yakni apa yang dipilih atau ditekankan dan apa yang dibuang. Artinya, fakta akan dilihat dari sisi tertentu dan berakibat pada pemahaman dan konstruksi fakta yang berbeda antara satu media dengan media lain. *Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Fakta yang sudah dipilih ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu (penempatan *headline*, pengulangan, pemakaian label, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. (Eriyanto, 2002: 81).

Pan dan Kosicki melihat framing sebagaimana wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. (Eriyanto, 2002: 290). Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaannya misalnya terletak pada tujuan penelitian. Penelitian kualitatif biasanya tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan (*explanation*), tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi (Pawito, 2007 :35)

Penelitian ini didesain dengan format penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin 2007 : 68)

2. Unit Observasi dan Unit Analisis

Unit observasi dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang keterlibatan pejabat negara dalam skandal Panama papers pada media cetak Majalah Tempo No. 4509 edisi 25 April- 1 Mei 2016.

Tabel. 3
Unit Observasi

No	Judul Berita	Hal.
1	Cangkang Luhut di Pojok Afrika	92 – 95
2	Jejaring Kuasa Sang Jendral	96 – 97
3	Luhut Binsar Pandjaitan : Ngapain Bikin Perusahaan Gitu ?	98
4	Tersembunyi di Tengah Samudra	99
5	Orang Kita di Gedung Akara	100 – 101

(sumber : oleh peneliti)

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah penjabaran secara lebih spesifik dari konsep framing yang digunakan. Dalam hal ini, penjabaran yang dimaksud adalah penggunaan model framing Pan dan Kosicki. Artinya, unit yang akan dianalisis pada teks berita Majalah Tempo adalah unit dari model analisis framing Pan Kosicki. Unit analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.
Unit Analisis Penelitian

No	Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamati
1	SINTAKSIS Cara Wartawan Menyusun Fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, Lead, Latar Informasi, Kutipan, Sumber, Pernyataan, Penutup</i>
2	SKRIP Cara Wartawan Mengisahkan Fakta	2. Kelengkapan Berita	<i>5W + 1H</i>
3	TEMATIK Cara Wartawan Menulis Fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat
4	RETORIS Cara Wartawan Menekankan Fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, Idiom, Gambar/ Foto, Grafik

Sumber : Pan dan Kosicki (Eriyanto 2002: 295)

Perangkat *framing* dalam pendekatan ini dapat dibagi dalam empat struktur besar. *Pertama*, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa-peristiwa, opini, kutipan, pengalaman atas peristiwa ke ide dalam bentuk susuna umum berita (*lead* yang dipakai, latar, *headline*, kutipan yang diambil, pernyataan penutup dan kesimpulan).

Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaiman wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk

berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Dari struktur ini dapat diketahui penonjolan maupun penghilangan fakta melalui kelengkapan berita yang terdiri dari 5W+1H (*who, what, when, where, why, dan how*).

Ketiga, struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Perangkat *framing* yang digunakan dalam struktur ini adalah detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti.

Keempat, struktur retorik. Retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata (leksikon), kiasan (metafora), pengandaian, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer sumber data penelitian ini yaitu teks berita yang berhubungan dengan pemberitaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal Panama Papers yang dimuat dalam Majalah Tempo no. 4509 edisi 25 April- 1 Mei 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung atau menunjang data primer sebagai literatur guna melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian ini. Yakni dengan berbagai literatur, misalnya buku, laporan atau jurnal, koran, dan sumber berita lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Yakni dengan pengumpulan data dalam bentuk tulisan dari suatu peristiwa penjelasan maupun pemikiran terhadap peristiwa itu. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut meliputi dokumen publik maupun privat yang berkaitan dengan tema penelitian (Krisyantono, 2006: 118). Dokumentasi di sini dapat berupa item-item berita, dan foto-foto terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mengolah data dari media cetak Majalah Tempo.

5. Metode Analisis Data

Ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif yaitu menganalisis proses suatu fenomena kemudian memperoleh gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna dibalik informasi, data dan proses dari suatu fenomena tersebut. (Bungin, 2007: 115).

Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini memiliki struktur dan unit analisis yang relatif lengkap sehingga memberi kemungkinan peneliti melakukan analisis secara lebih detail. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. *Frame* berhubungan dengan makna, bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Perangkat secara struktural dapat dilihat dari pemilihan kata atau simbol yang dibentuk melalui aturan atau konvensi tertentu.

6. Metode Keabsahan Data

Uji keabsahan data penting dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak diragukan kebenarannya. Uji keabsahan data ini diperoleh melalui triangulasi. Moleong menjelaskan triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk dijadikan pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2005 : 330)

Denzin (1978) dalam Moleong (2005 : 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. *Pertama*, triangulasi

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2005 : 330). *Kedua*, triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2005:331), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Ketiga, triangulasi antar peneliti. Teknik triangulasi jenis ketiga ini adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan hasil kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya. *Keempat* triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2005 : 331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan menguraikan pola, hubungan dan juga menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema ataupun penjelasan pembanding. Dwidjowinoto dalam Kriyantono (2009 : 70), menjelaskan, triangulasi sumber adalah membandingkan atau

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil analisis framing model Pan Kosicki, maka konstruksi Tempo dalam pemberitaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal *Panama Papers* adalah sebagai berikut ;

1. Tempo mengkonstruksi realitas bahwa Luhut Binsar Pandjaitan adalah sosok pejabat negara yang bersalah karena namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers.
2. Tempo mengkonstruksi bahwa pejabat-pejabat publik yang terlibat dalam skandal *Panama Papers* lebih banyak mengelak tuduhan tersebut. Penyertaan dasar hukum berupa undang-undang mengandung pesan bahwa para pejabat yang terkait *Panama Papers* telah melakukan pelanggaran dalam bentuk penyimpangan pajak.
3. Konstruksi yang dibangun oleh Tempo dalam pemberitaan skandal Panama Papers yang melibatkan pejabat negara lebih bersifat provokasi. Berita ini berusaha menggiring khalayak untuk tidak menerima kebijakan pemerintah yang terkesan diam saja dalam menanggapi kasus tersebut.
4. Pemberitaan tentang Panama Papers belum memberikan porsi yang memadai mengenai hal-hal mendasar mengenai praktek pendirian perusahaan offshore. Ada hal-hal yang tidak tercover oleh Tempo,

seperti mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak melanggar hukum, mana yang tergolong pelanggaran hukum, kenapa itu dilakukan, bagaimana caranya dan siapa yang melakukannya. Sehingga bisa membuat publik menduga-duga jika mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers bersalah atau setidaknya mereka mempunyai niat yang tidak baik.

B. Saran

1. Bagi peneliti yang berkonsentrasi pada analisis framing model Pan Kosicki, maka yang perlu diperhatikan adalah kejenuhan yang disebabkan karena pembahasan yang berulang pada setiap berita.
2. Karena penelitian ini mengkaji tentang konstruksi media, sebaiknya pekerja media dilibatkan dengan wawancara sehingga proses analisis yang dilakukan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis
- Harsono, Andreas. 2008. *Jurnalisme Sastrawi : Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Keller, Anett. 2009. *Tantangan dari Dalam : Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional : Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*. Jakarta : Friederich Ebert Stiftung.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- McQuail, Dennis. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Salemba
- Moleong J, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : Lkis
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung : Eresco
- Sommerfeld, Ray M dkk. *An Introduction to Taxation*. New York : Harcourt Brace Jovanovic, Inc
- Steele, Janet. 2007. *Wars Within : The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia*. Jakarta : Equinox Publishing.

Skripsi

- Lasinta, Megafirmawanti. 2014. "Konstruksi Media Online dalam Sengketa Verifikasi Partai Politik (Analisis Framing Tempo.co dan Viva.co.id pada Pemberitaan Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari – 31 Maret 2013)". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Mawardi, Gema. 2012. "Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia, Depok
- Setyaningsih, Tanti. 2014. "Konstruksi Kepemimpinan JOKOWI di Media Cetak (Analisis Framing Pemberitaan pada Liputan Khusus Satu Tahun Kepemimpinan JOKOWI Sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi 14-18 Oktober 2013)". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Internet

- <https://investigasi.tempo.co/panama/> diakses pada 1 Mei 2016 pukul 09.35
- <https://majalah.tempo.co/> diakses pada 12 Mei 2016 pukul 20.25
- <https://tempo.co/panamapapers/> diakses pada 1 Mei 2016 pukul 20.30
- <http://m.metrotvnews.com/news/hukum/VNnxJnAk-membedah-panama-papers-agar-tak-melanggar-ham> diakses pada 17 Februari pukul 19.30
- <http://news.detik.com/berita/3195700/penjelasan-lengkap-luhut-pandjaitan-soal-namanya-di-panama-papers> diakses pada 17 Februari pukul 20.00

Majalah

- Tempo edisi 1 Mei 2016
- Tempo edisi 7 Maret 2011
- Tempo edisi 26 Oktober 2008

PEJABAT PUBLIK DI PANAMA PAPERS

PEMERINTAH semestinya tak tinggal diam terhadap temuan yang menyebutkan sejumlah pejabat negara tercantum dalam Panama Papers. Presiden Joko Widodo tak cukup hanya memanggil dan mendengarkan penjelasan pejabat yang memiliki perusahaan di negara-negara suaka pajak—seperti terungkap dalam bocoran dokumen firma Mossack Fonseca di Panama. Presiden harus mengambil tindakan yang lebih drastis: membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki motif sesungguhnya di balik pembukaan perusahaan di kawasan *tax haven* itu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jelas mengamankan hal itu.

Bocoran dokumen itu menaksir tak kurang dari Rp 2.300 triliun uang orang Indonesia ditanam di sejumlah yurisdiksi bebas pajak. Data di semua negara berkembang menyebutkan lebih dari satu triliun dolar uang ilegal disedot keluar setiap tahun. Ini jauh lebih besar daripada seluruh investasi luar negeri yang masuk ke negara-negara itu setiap tahun. Alangkah memalukannya jika pejabat publik yang semestinya mencegah aliran dana itu keluar justru menjadi salah satu aktor di dalamnya.

Tindakan mereka patut diduga sebagai upaya melawan hukum. Paling tidak, mereka punya niat yang patut dipertanyakan. Sebagai penyelenggara negara, mereka jelas memiliki kewajiban melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi tak satu pun pejabat yang menjadi klien Mossack Fonseca itu melaporkan perusahaan cangkang yang mereka dirikan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, menurut Panama Papers, merupakan Direktur Mayfair International Ltd yang terdaftar di Republik Seychelles pada 2006. Selain Luhut, dalam kasus dan berkas yang berbeda ada nama mantan anggota staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Heru Lelono, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ajrlangga Hartarto dan Johnny G. Plate.

Nama Luhut terungkap dalam empat berkas. Setiap *file* memuat akta pendirian perusahaan cangkang Mayfair, penunjukan Luhut sebagai Direktur Mayfair, serta saham Mayfair yang dimiliki PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi. Buana merupakan salah satu anak perusahaan Toba Sejahtera milik Luhut. Direk-



tur Utama Buana pernah dijabat putra Luhut.

Luhut memang bukan pejabat negara saat namanya didaftarkan sebagai Direktur Mayfair. Tapi, ketika diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan kemudian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, ia semestinya melaporkan posisinya di Mayfair kepada KPK. Apalagi kemudian ditemukan fakta bahwa Persada merupakan anggota konsorsium yang memenangi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 Bengkayang di Kalimantan Barat, yang bernilai lebih dari setengah triliun rupiah.

Pejabat lain yang tersangkut Panama Papers adalah Harry Azhar Azis. Dalam laporan harta kekayaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu, tak tercantum catatan pendirian perusahaan Sheng Yue International Limited. Sheng Yue adalah perusahaan cangkang yang didaftarkan Harry di British Virgin Islands pada 2010. Tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang mewajibkan pejabat melaporkan harta kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Tidak hanya tak melaporkannya ke KPK, Harry pada awalnya menyangkal temuan hasil investigasi 370 jurnalis dari 76 negara—termasuk *Tempo*—itu. Jika pemenuhan standar umum soal keterbukaan harta saja tidak dilakukan oleh pejabat, bagaimana mungkin ia bisa dipercaya memimpin lembaga tinggi negara yang mengedepankan prinsip transparansi?

Harus diakui, perangkat hukum kita masih sangat longgar mengatur pejabat publik yang berbisnis. Di Thailand dan Filipina, soal ini bahkan diatur dalam konstitusi. Kita memang pernah punya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Tapi peraturan ini sudah tak relevan karena sekadar melarang pejabat negara secara langsung memiliki atau memimpin perusahaan swasta—sekali tak melarang mereka memiliki saham perusahaan.

Pemerintah dan DPR jelas perlu bersegera merancang undang-undang yang mengatur pejabat negara berbisnis. Undang-undang ini amat penting untuk menghadang "perselingkuhan bisnis" para pejabat yang nyata-nyata telah menggerus kepercayaan publik.

Presiden hendaknya tidak memaklumi apologi pejabat yang tercantum dalam Panama Papers. Selayaknya ia tak pula memandang kasus ini sekadar kegaduhan sesaat.

● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 92

CANGKANG LUHUT DI POJOK AFRIKA

Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tercantum di Panama Papers. Dia disebut sebagai Direktur Mayfair International Ltd, perusahaan cangkang di Republik Seychelles, negara suka pajak di Afrika. Penelusuran *Tempo* menemukan jejak Mayfair—dan perusahaan milik Luhut—di sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia.

BELASAN menara baja tercogok di kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 Tanjung Gundul, Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu pekan lalu. Tak terlihat aktivitas pekerja di kompleks seluas 45 hektare itu. Sebagian besi menara tampak terserang karat. Rumput liar tumbuh berserak mengepung gedung-gedung yang tak berpenghuni.

Penduduk Kalimantan Barat sangat membutuhkan tambahan pasokan listrik. Hingga sekarang, wilayah itu masih rutin mengalami pemadaman listrik. Tapi pengerjaan PLTU 2 yang seharusnya rampung pada 2012 itu malah terhenti. "Ada masalah kontrak pembayaran dengan vendor," kata General Manager PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat Aji Sutrisno.

PLTU 2 Bengkayang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 yang menugasi PLN melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik

tenaga batu bara. Proyek pembangkit listrik bertenaga 2 x 27,5 megawatt itu dikerjakan konsorsium PT Indo Fuji Energi, PT Advance Technology Indonesia, Guangdong Machinery Imp & Exp Co Ltd, dan PT Persada Inti Energi.

Tempo mereportase PLTU Bengkayang lantaran PT Persada Inti Energi tercatat dalam berkas Panama Papers, dokumen firma hukum Mossack Fonseca di Panama yang bocor. Persada tercatat sebagai pemegang saham sebuah perusahaan di Republik Seychelles. Namanya Mayfair International Ltd. Pemilik lainnya PT Buana Inti Energi. Dan direktur perusahaan ini Luhut Binsar Pandjaitan, kini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Meski menjadi anggota konsorsium yang ditunjuk membangun pembangkit listrik batu bara senilai sekitar Rp 630 miliar, menggunakan anggaran PLN, Persada tak memiliki rekam jejak meyakinkan. Mesin pencari Google hanya mencatatnya terlibat proyek PLTU 2 Bengkayang. Aktivitas lain tidak ada. Pada 2012, menurut Aji, Persada dan Guangdong, yang merupakan perusa-

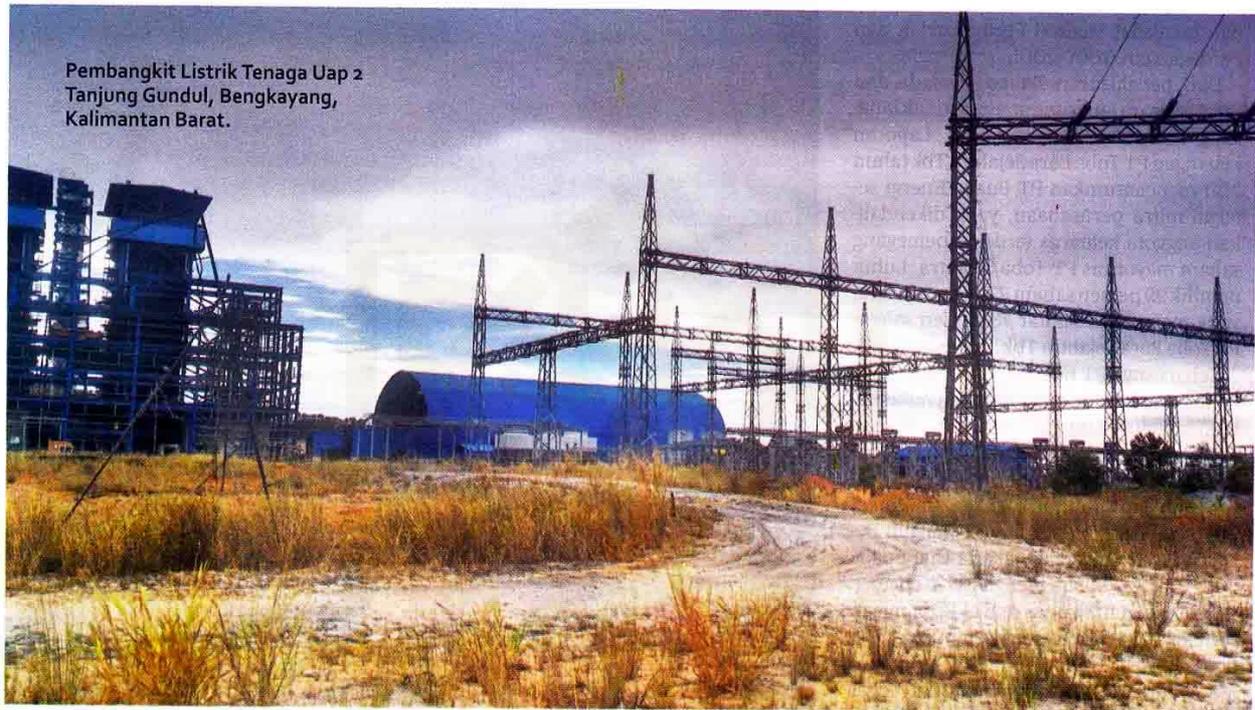
haan milik negara di Cina, hengkang dari konsorsium.

PLN kemudian memperpanjang kontrak penyelesaian pembangkit tersebut dengan anggota konsorsium yang tersisa, Indo Fuji dan Advance Technology. Tapi kondisi proyek tidak menjadi lebih baik.



DOKUMEN panama berisi nama-nama perusahaan cangkang (*shell companies*) di negara suka pajak (*tax haven*). Lebih dari seratus media di seluruh dunia terlibat dalam proyek investigasi bersama meneliti 11,5 juta dokumen tersebut, di bawah koordinasi International Consortium of Investigative Journalists. Lembaga pers nonprofit yang berkantor pusat di Washington, DC, ini menerima data berukuran 2,6 *terabyte* milik Mossack Fonseca itu dari koran Jerman, *Süddeutsche Zeitung*.

Memiliki perusahaan di negara suka pajak belum tentu pelanggaran. Banyak perusahaan menggunakannya untuk tujuan legal. Meski demikian, dokumen Panama menunjukkan tak sedikit pula klien Mos-



Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2
Tanjung Gundul, Bengkayang,
Kalimantan Barat.

sack Fonseca memanfaatkan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan harta ilegal dan menghindari pajak di negara asalnya. Pemilik asli perusahaan-perusahaan ini (*beneficial owner*) bersembunyi di balik *nominee*, orang yang dibayar untuk mewakili mereka dalam dokumen resmi.

Kemunculan Panama Papers mengungkap identitas para pemilik asli yang selama ini tersembunyi. Banyak pejabat tinggi berbagai negara tersangkut, baik langsung maupun melalui orang dekat dan keluarganya. Di antaranya Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dan Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria malah sampai mengundurkan diri.

Di Tanah Air, selain Luhut, pejabat negara yang namanya muncul dalam Panama Papers antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Airlangga Hartarto dan Johnny G. Plate. Lalu ada juga

Heru Lelono, anggota staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Edi Yosfi, pengusaha yang dekat dengan petinggi Partai Amanat Nasional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mewajibkan semua pejabat negara melaporkan harta kekayaannya. Undang-undang itu menyebutkan ada sanksi administratif bagi pelanggarnya. Dari penelusuran *Tempo*, Luhut, Harry, Airlangga, Heru, dan Johnny tak melaporkan keterkaitan mereka dengan perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak.



MAYFAIR International Ltd didirikan pada 29 Juni 2006. PT Persada menguasai 10 ribu lembar saham perusahaan ini, sementara PT Buana 40 ribu lembar. Setiap lembar saham bernilai US\$1.

Dalam akta pendiriannya, Mayfair disebut beralamat di Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles. Ini negara kepulau-

an bekas jajahan Inggris yang bersebelahan dengan Pulau Madagaskar, terpencil di tengah Samudra Hindia, sekitar 1.600 kilometer ke arah timur daratan Afrika. Negara itu dikenal sebagai salah satu yurisdiksi suaka pajak favorit—selain British Virgin Islands. Luasnya 459 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk hanya sekitar 90 ribu jiwa.

Salah satu fitur yang membuat Seychelles banyak diminati, di sana kerahasiaan klien terjamin. Seychelles tidak membuat perjanjian pertukaran informasi pajak dan perbankan dengan negara atau organisasi internasional mana pun.

Pada hari yang sama dengan pendirian Mayfair International Ltd, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai satu-satunya direktur. Dalam sertifikat penunjukan direktur Mayfair, Luhut dinyatakan beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 11, Jakarta, dengan nomor paspor B370929.

Luhut sejak 13 Agustus 2015 menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Pensiunan jenderal itu juga per-

nah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 2000-2001.

Dari penelusuran *Tempo*, Persada dan Buana secara langsung ataupun tidak langsung terkoneksi dengan Luhut. Laporan keuangan PT Toba Bara Sejahtera Tbk tahun 2011 mencantumkan PT Buana Energi sebagai mitra perusahaan, yang dikendalikan anggota keluarga terdekat pemegang saham mayoritas PT Toba Sejahtera. Luhut pemilik 99 persen saham PT Toba Sejahtera, yang menguasai sekitar 73 persen saham PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

Seharusnya PT Buana tergolong perusahaan besar karena mendapat izin hutan tanaman industri untuk tanaman karet seluas 26.300 hektare dari Kementerian Kehutanan pada 2010.

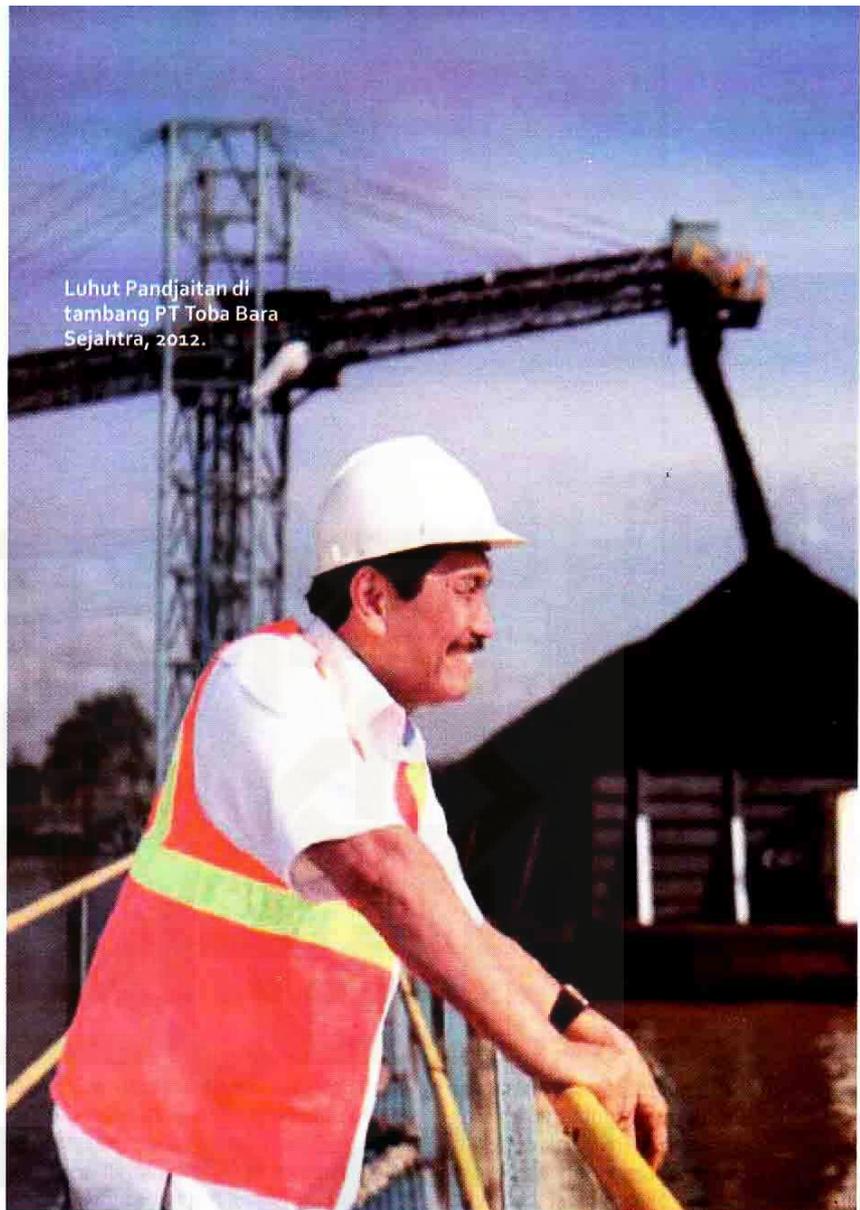
Dalam situs putusan Mahkamah Agung, Buana terekam menggugat PT Bangun Bejana Baja di Pengadilan Jakarta Utara pada 2011. Saat itu, Buana menguasai 40 persen saham Bangun Bejana, senilai Rp 2 miliar. Mereka bersengketa soal pembukuan Bangun Bejana. Salinan putusan bernomor 518 K/Pdt/2012 itu menyebut Davit Togar Pandjaitan sebagai Direktur Umum PT Buana. Davit adalah satu dari dua putra Luhut.

PT Persada dimiliki dua pihak, yaitu PT Pelita Buana Karya dan Elizabeth Prasetyo Utomo. Akta perubahan anggaran dasar Persada pada 2012 mencantumkan Pelita sebagai pemegang 9.900 lembar saham Persada, senilai Rp 9,9 miliar. Elizabeth memiliki 100. Elizabeth dan Luhut kawan lama. Dia menjabat direktur keuangan di PT Toba Bara Sejahtera Tbk periode 2008-2009.



SURAT-menyurat elektronik itu berlangsung selama Februari-Maret 2007. Seseorang bernama Dave bertanya kepada Lisa dari perwakilan Mossack Fonseca di St. Helier, Jersey, apakah masih tersedia nama perusahaan Mayfair International Ltd. Lisa mengatakan nama itu sudah digunakan. Ia menawarkan nama lain plus bonus *free of charge* 14 hari pertama. Selanjutnya biaya administrasi "pemeliharaan" perusahaan cangkang US\$100 setiap tiga bulan.

Ada beberapa surat elektronik di antara Mossack Fonseca di berbagai yurisdiksi membicarakan Mayfair. Rupanya, Mayfair termasuk nama yang digandrungi. Perusahaan ini awalnya didirikan Valserve Ltd,



Luhut Pandjaitan di tambang PT Toba Bara Sejahtera, 2012.

firma hukum di British Virgin Islands.

PT Persada dan PT Buana mendapatkan nama tersebut melalui kantor cabang Mossack di Singapura sebagai *client agent*, yang kemudian memintanya ke kantor Mossack di Seychelles. Mungkin lantaran populer, biaya "perawatan" Mayfair tergolong tinggi. Dalam satu dokumen bertanggal 11 September 2006, Mayfair diminta membayar uang jasa US\$ 512 untuk periode tiga bulan.

Dalam dokumen kepemilikan saham Mayfair, Persada dan Buana tercatat menempati kantor yang sama, di lantai tiga Graha Binakarsa, Jalan H R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. *Tempo* menyambangi Graha Binakarsa pada Selasa pekan lalu. Dua perusahaan itu tidak ada di sana.

Seorang petugas keamanan mengatakan

belum pernah mendengar PT Buana. Adapun PT Persada, menurut dia, sudah angkat kaki dari sana pada Oktober tahun lalu. Perusahaan itu, kata dia, menggunakan alamat yang sama dengan satu perusahaan lain. "Orang gedung di sini tahunya kedua perusahaan itu milik Pak Luhut," ujarnya.

Tempo juga menyambangi rumah Elizabeth Prasetyo Utomo di Jalan Palma Raya, Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat, pada Selasa dan Rabu pekan lalu. Elizabeth semestinya tahu banyak tentang Persada dan proyek listrik PLTU 2 di Bengkayang. Saat rumah itu didatangi, pembantu di sana mengatakan dia tak berada di rumah. Surat permohonan wawancara belum ia respons hingga Jumat pekan lalu.



1

MAYFAIR INTERNATIONAL LTD.
(Incorporated in Seychelles)
Company Name

MEMBERS Names & Addresses	Cust No.	No. & Class of Shares	Date Issued	Transfer / Exchange			Repurchase / Redemption		
				Date	No. & Class of Shares	New Cust No.	Date	No. & Class of Shares	No. & Class of Shares Cancelled
PT Persada Int Energy Citra Bromaha, 3 rd Floor, Jl. HR. Rasuna Said, Kuning C. 18, Jakarta 12560, Indonesia	01	10.000, Ordinary	29 June 2009						
PT Sibura Int Energy Citra Bromaha, 3 rd Floor, Jl. HR. Rasuna Said C.18, South Jakarta 12560, Indonesia	02	45.000, Ordinary	29 June 2009						

REGISTER OF MEMBERS

2

MAYFAIR INTERNATIONAL LTD.
(Incorporated in Seychelles)
Company Name

ONE COPY OF THIS RESUME MUST BE KEPT AT THE REGISTERED OFFICE

Date of Appointment	Full Name	Nationality & Identity Card or Passport No.	Residential Address (or Registered Office Address)	Occupation	Date of Cessation
29 June 2009	Luhut Binsar Panjaitan	Indonesia Passport No.: 8370569	Jl. Mega Kuningan Barat 01/11 Jakarta 10260, Indonesia	Director	

REG



RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER
OF
MAYFAIR INTERNATIONAL LTD.
(the "Company")

The undersigned, being the Subscriber to the Memorandum and Articles of Association of the Company, hereby appoints

LUHUT BINSAR PANJAITAN

as the first Director(s) of the Company, to serve as such until his/her/their successor(s) shall have been elected or until his/her/their resignation or removal(s), each of which(s) shall be effective immediately, and without further qualification.

Dated this 29 June 2009.

L. BINSAR PANJAITAN
Subscriber

1. Daftar pemegang saham Mayfair International Ltd.
2. Daftar direksi Mayfair International Ltd.
3. Sertifikat pendidikan Mayfair International Ltd di Republik Seychelles.
4. Surat penunjukan Direktur Mayfair International Ltd.

3

4

LUHUT membantah pernah terlibat dengan Mayfair International Ltd. Ia bahkan mengaku baru mendengar nama PT Persada Inti Energi. "Saya tidak kenal," ujarnya tegas, Kamis pekan lalu. Lagi pula, kata dia, pada 2006 bisnisnya belum seberapa sehingga untuk apa membuat perusahaan semacam itu. "Saya baru punya uang pada 2010."

Direktur Keuangan PT Toba Bara Sejahtera Catherine Warouw, yang turut hadir ketika *Tempo* mewawancarai Luhut, mengatakan tak pernah mengeluarkan biaya apa

pun untuk Mayfair. "Sepengetahuan saya, tidak pernah ada Mayfair," ujarnya. "Tanyakan saja ke Elizabeth."

Pada Agustus 2001, ketika menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut melaporkan kekayaannya Rp 7 miliar, kebanyakan berupa tanah dan mobil. Informasi tersebut tersedia bagi publik di situs Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara pada Agustus 2015, harta mantan perwira Kopassus ini melonjak menjadi Rp 660

miliar. Selain ada penambahan jumlah tanah dan mobil, Luhut memiliki surat berharga senilai Rp 104,8 miliar.

Mengenai kekayaannya yang menanjak cepat, Luhut mengatakan hal itu lantaran *booming* harga batu bara sejak 2009. "Itu *hands of God*," katanya. Dia menegaskan, fokus bisnisnya masih seputar energi dan hasil bumi. Dan dia membantah terlibat proyek PLTU 2 Bengkayang bersama PT Persada. "Kami tidak masuk ke situ. Itu bukan grup kami." ●

INVESTIGASI

Penanggung jawab: Philipus Parera Penyunting: Philipus Parera, Wahyu Dhyatmika Pemimpin proyek: Mustafa Silalahi
Penulis: Mustafa Silalahi, Rusman Paraqbueq, Pramono, Agoeng Wijaya Penyumbang bahan: Aseanty Pahlevi (Kalimantan Barat), Agoeng Wijaya, Inge Klara, Mustafa Silalahi, Pramono, Rusman Paraqbueq (Jakarta) Bahasa: Uu Suhardi, Iyan Bastian, Sapto Nugroho
Periset foto: Ijar Karim Pengolah foto: Hindrawan Desain: Eko Punto Pambudi



JEJARING KUASA SANG JENDERAL

Harta Luhut naik berlipat-lipat menjadi Rp 660 miliar dalam satu dasawarsa. Pengaruhnya terasa di semua sudut Istana.

DUA gedung berlantai 41 dan 23 menjulang ke angkasa di kawasan Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Berdiri di atas lahan seluas 1,7 hektare, dua menara itu belum tuntas dibangun. Kamis pekan lalu, beberapa buruh tampak sibuk memasang dinding bangunan.

Gedung tersebut bakal menjadi kantor PT Toba Sejahtra, perahu induk bisnis moncer Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dari rumah Luhut di Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 18, Jakarta Selatan, dua bangunan itu jelas terlihat. Jaraknya hanya 200 meter.

Luhut mendirikan Toba Sejahtra pada 2004. Dalam satu dasawarsa, Toba beranak-pinak menjadi 16 anak perusahaan. Kepada *Tempo*, Luhut mengaku membesarkan Toba untuk menghidupi Institut Teknologi Del, yang dibangunnya pada 2001. Sekolah calon insinyur ini berdiri megah di tepi Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, tempat kelahiran Luhut. "Saya subsidi sampai hari ini, Rp 30 miliar setahun," kata Luhut di rumahnya, Kamis pekan lalu.

Toba bergerak di setidaknya empat sektor usaha: pertambangan batu bara, minyak dan gas, pembangkit listrik, serta perkebunan. Semua area konsesi tambang batu bara grup Toba berada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Di mata rekan-rekannya, Luhut memang dikenal cekatan berbisnis. "Dia jalan, *blek*, (jadi) uang deh," ujar seorang kawan baiknya sambil tertawa. Luhut juga dikenal setia kawan, selalu ingat kepada sahabatnya

di dinas militer. Tak aneh jika kini sejumlah pensiunan jenderal TNI bekerja di Toba.

Empat di antaranya adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Johny Lumintang, mantan Panglima Kodam Udayana Sintong Panjaitan, Sumardi, dan Agus Widjojo—Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang dilantik Presiden Joko Widodo dua pekan lalu. Semua kini menjadi petinggi di perusahaan Luhut. "Saya bergabung dengan Pak Luhut pada Mei 2005," kata Sumardi, Kamis pekan lalu.

Sumardi adalah Chief Executive Officer Toba Sejahtra. Dia berkantor di lantai 17 Wisma Bakrie 2, Jalan Hajah Rangkayo Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di sana, Luhut menyewa beberapa lantai sebagai kantor usaha. Sumardi membenarkan kabar bahwa beberapa kursi komisaris di grup Toba diisi purnawirawan tentara.

Dihubungi terpisah, Agus Widjojo mengaku dipercaya mengurus lembaga kajian milik Luhut. "Ini (lembaga) tidak ikut dalam politik praktis," ujarnya. Ketika ditanyai soal ini, Luhut mengakui mengajak sahabat-sahabatnya berkecimpung di Toba karena, "Setelah pensiun, (mereka) tidak ada kegiatan apa-apa."

Yang jelas, peruntungan bisnis Luhut memang luar biasa. Dalam waktu 14 tahun, harta kekayaan mantan Duta Besar Indonesia di Singapura ini naik berlipat-lipat. Pada 2001, sesuai dengan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Luhut memiliki aset senilai Rp 7,1 miliar dan US\$ 295 ribu. Empat belas tahun kemudian, pada 2015, nilai kekayaan mantan Komandan Pendidikan dan Pelatihan TNI Angkatan Darat ini melonjak ta-

jam menjadi Rp 660 miliar.

Luhut beralih, nilai hartanya meningkat drastis karena terjadi kenaikan harga batu bara pada 2010. Padahal, kata dia, sebelum tahun itu, ia tak memiliki uang. "Kalau orang bilang saya hebat, saya tidak merasa hebat," ujarnya kalem.

Yang menarik, dari dokumen yang diperoleh *Tempo*, separuh harta Luhut tersebar di luar grup Toba. Sebagian berserak di enam perusahaan milik grup Bakrie. Keenam firma itu adalah Bakrie & Brothers, Bakrie Sumatera Plantations, Bakrie Telecom, Bakrieland Development, Energi Mega Persada, dan PT Bumi Resources. Nilai kepemilikan saham Luhut di enam perseroan ini mencapai Rp 98 miliar. Semua saham itu dibeli hampir bersamaan: pada 2013.

Selain di grup Bakrie, saham Luhut ditemukan di empat perseroan lain, di luar grup Toba miliknya. Keempat perusahaan itu adalah PT Del Bejana Utama, PT Mitra-guna Primajaya, PT Frime Fields Indonesia, dan PT Rimba Etam Lestari.

Soal kepemilikannya di grup Bakrie, Luhut menampik kabar bahwa dia memborong saham Aburizal di Bumi Resources tiga tahun lalu. "Itu saham publik," ujarnya. Juru bicara keluarga Aburizal, Lalu Mara Satriawangsa, membenarkan. Menurut dia, semua saham perusahaan Bakrie itu bersifat terbuka sehingga siapa pun bisa membelinya di bursa. "Anda juga bisa beli. Sekarang harganya 50 perak per lembar," kata Lalu Mara.

Fakta bahwa Luhut membeli saham grup Bakrie sebenarnya tidak terlampau mengejutkan. Keduanya punya sejarah panjang bersama. Lalu Mara bercerita bahwa Aburizal sudah mengenal Luhut ketika bosnya



Tambang batu bara PT Toba Bara Sejahtera.

itu baru merintis usaha, pada 1975. Kala itu, Luhut masih berpangkat letnan satu.

Persahabatan personal dan kongsi dagang keduanya berlanjut ke dunia politik. Politikus senior Partai Golkar, Leo Nababan, mengatakan, ketika Aburizal terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golkar periode 2009-2014 di Riau, dia langsung mengajak Luhut bergabung. Luhut diberi posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar. Lalu Mara membenarkan cerita Leo: "Memang betul."

Kedekatan Luhut-Bakrie sedikit retak pada pemilihan umum presiden 2014. Kedua kolega ini memilih opsi politik yang berseberangan. Luhut mendukung Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan Aburizal *all-out* mendukung Prabowo Subianto, kandidat yang diusung Partai Gerindra. Akibat perbedaan pilihan itu, Luhut lalu mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar.

Bagi Luhut, Jokowi memang punya arti khusus. Keduanya berkenalan ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo (2005-2012). Ketika itu, anak perusahaan grup Toba, PT Adimitra Lestari, berencana menjual kayu gelondongan setelah mendapat hak pengelolaan hutan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

Luhut lalu menugasi Direktur Utama PT Adimitra, Bambang Supriambodo, mencari mitra bisnis yang bisa mengelola kayu. "Seminggu kemudian, dia datang ke saya. Ada Pak, teman sekolah saya, sekarang Wali Kota Solo," ujar Luhut menirukan ucapan Bambang ketika itu.

Kepada *Tempo*, Bambang membenarkan kisah Luhut. Bambang mengaku dialah yang menjemput Jokowi dan membawanya ke Wisma Bakrie 2 di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menemui Luhut. "Saya tawarkan ke Pak Luhut, ternyata beliau berminat," kata Bambang.

Singkat cerita, pada 2007 itu Luhut dan Jokowi sepakat berkongsi usaha dan mendirikan perusahaan pengolah kayu: PT Rakabumi Sejahtera. Komposisi sahamnya, 51 persen dipegang oleh keluarga Jokowi dan 49 persen oleh Luhut. "Sekarang makin bagus, ekspornya makin baik," ujar Luhut.

Kerja sama bisnis ini berlanjut ke urusan politik. Luhut mengaku mengamati dengan penuh perhatian bagaimana Jokowi menjadi semakin populer di Solo. Menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2012, Luhut mendekati Jokowi dan menawarinya menjadi calon Gubernur Jakarta.

Insting politik Luhut terbukti. Ketenaran Jokowi menjadi senjata ampuh mengalah-

kan kandidat inkumben Fauzi Bowo di Ibu Kota. Kemenangan ini membuat Luhut makin yakin pada elektabilitas Jokowi. "Begitu menang pilkada, saya bilang, 'Siapa-siapa jadi calon presiden'," ucapnya.

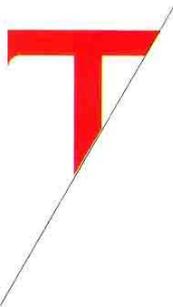
Begitu pemilihan presiden bergulir, jejaring Luhut pun bekerja. Dia menjadi penyokong utama Jokowi di barisan tim relawan. Selain membiayai beberapa kali survei, Luhut membentuk tim Bravo, kelompok relawan yang beranggotakan pensiunan tentara, seperti Fachrul Razi, Suaidi Marasabessy, dan Agus Widjojo. "Saya ada di tim kajian dan pelatihan kader," ujar Agus Widjojo membenarkan.

Selebihnya adalah sejarah. Dengan sokongan penuh para relawan dan mesin politik sejumlah partai, Jokowi meraih suara lebih banyak daripada Prabowo pada pemilihan langsung Juli 2014. Setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi meminta Luhut menjadi Kepala Staf Kepresidenan alias menempati posisi pembantu terdekat RI-1 di Istana.

Di sini, tugas utama Luhut adalah mendukung penuh Presiden dalam mengendalikan program-program prioritas nasional, komunikasi politik, serta pengelolaan isu strategis. Ia juga ditugasi menjadi juru lobi ke partai-partai koalisi pendukung Prabowo untuk memuluskan jalannya kebijakan pemerintah.

Pada 2015, saat Jokowi menargetkan kenaikan pendapatan di sektor pajak, Luhut bergerak cepat. Ia menugasi anggota tim ekonominya, Septian Hario Seto, melakukan beberapa kajian. "Kami beberapa kali menggelar rapat dengan pengusaha dan Dirjen Pajak," kata Seto. Hasil kajian itu adalah draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*). Bisa dibilang, rancangan regulasi itu adalah buah kerja keras Luhut dan timnya.

Karena itulah, walau diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada Agustus tahun lalu, Luhut tetap menjadi dirigen utama tim Jokowi untuk mengegolkan RUU Pengampunan Pajak di Senayan. "Kami rapat beberapa kali di Polhukam," ujar Luhut. Dia yakin Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan RUU itu secepatnya. "Bisa Rabu pekan ini," katanya. Jika keyakinan ini benar, sekali lagi, insting politik dan jejaring pengaruh Luhut terbukti ampuh. ●



Luhut Binsar Pandjaitan:

NGAPAIN BIKIN PERUSAHAAN GITU?

DI dalam ruang tamu kecil di depan kolam renang rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menerima tim investigasi *Tempo*, Kamis pagi pekan lalu. Dia mengaku tak mengenal Mayfair International Ltd, perusahaan cangkang di negara *tax haven* Republik Seychelles, Afrika Timur, meski namanya tercatat sebagai satu-satunya direktur.

Wawancara berlangsung selama 50 menit. Luhut, 68 tahun, didampingi sejumlah anggota staf dan direksi perusahaannya, termasuk Direktur Keuangan Toba Sejahtera Catherine Warouw dan Presiden Direktur PT Kartanegara Energi Perkasa Bambang Irawan.

Kadang suaranya meninggi saat menjawab pertanyaan mengenai Mayfair. Pada saat lain, misalnya ketika menceritakan riwayat bisnisnya dengan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 2009, nada suara purnawirawan jenderal TNI ini melunakrangi. Kalau Luhut ke Solo, Jokowi, yang ketika itu wali kota, menjemputnya sendiri tanpa sopir dan pengawal. "Saya dulu panggil beliau 'Situ', sekarang 'Pak Presiden,'" katanya, terbahak.

Nama Anda tercatat dalam Panama Papers sebagai Direktur Mayfair International Ltd. Alamat perusahaannya di Indonesia, Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 11.

Saya belum pernah dengar. Saya suruh semua anggota staf saya mengecek sepanjang hari kemarin. Kami tak pernah punya Mayfair. Rumah ini nomor 18.

Benarkah Anda mendaftarkan perusahaan itu pada 2006?

Saya tidak punya duit pada 2006. Saya baru punya duit pada 2010, sewaktu harga



batu bara melonjak. *Ngapain* bikin perusahaan begitu? Sebagai perwira, saya ajari dan perintahkan pegawai saya agar semua kewajiban dipenuhi. Makanya, kami bayar pajak pada 2010-2015 sekitar US\$ 300 juta. Kami mendapat penghargaan. (Seorang anggota stafnya memperlihatkan piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat untuk PT Adimitra Baratama Nusantara, perusahaan milik Luhut.)

Kenapa tidak memasukkan perusahaan ini ke laporan kekayaan?

Ya, memang tidak ada. Tidak ada uangnya juga. *Ngapain* saya *masukin*?

Pemegang saham Mayfair ada dua perusahaan, PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi....

Buana Inti Energi memang berafiliasi dengan perusahaan kami. Tapi Persada saya tidak tahu.

Anda juga tidak mengenal PT Pelita Buana Karya dan Elizabeth Prasetyo Utomo yang tercatat sebagai pemilik Persada?

Elizabeth ini direktur *finance* saya dulu. Pada 2008, saya minta dia *resign* karena tidak cocok dengan apa yang kami bangun, keterbukaan dalam perusahaan. Kami putus hubungan. (Elizabeth tak merespons permintaan wawancara *Tempo*.)

Persada ikut dalam konsorsium yang menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap II di Kalimantan Barat yang bermasalah....

Kami tidak masuk ke situ. Itu bukan grup kami.

Buana Inti Energi adalah pemegang saham terbesar Mayfair.

Sebenarnya, kalau *you* telusuri, enggak ada *trading*-nya itu. Buana belum jalan, kok. Dulu mau bergerak di perkebunan karet di Kutai Kartanegara, tapi harga karet turun. Profit dari batu bara juga turun. Saya suruh hentikan saja. Kami kehilangan Rp 10 miliar dari situ.

Tapi usaha Anda yang lain menguntungkan?

Kalau orang bilang saya hebat, saya tidak merasa hebat. Semula saya pikir untung US\$ 1 atau US\$ 2 saja sudah lumayan. Tiba-tiba saja harga batu bara meledak, US\$ 30, ada juga yang US\$ 40. Itu *hands of God*.

Anda berbisnis setelah pensiun dari TNI?

Iya, dong. Saya bikin perusahaan pertama kali pada 2004. Alasannya sederhana saja, supaya sekolah saya hidup. Sejak 2001 sampai hari ini, saya subsidi sekolah itu Rp 30 miliar per tahun. (Luhut memiliki sekolah dan Universitas Del di Sumatera Utara.)

Anda pernah membuat perusahaan di luar negeri?

Saya tidak tahu.

Bambang: Model ini memang sering dipakai untuk bisnis, tapi tidak kami pakai.

Catherine: Bisa dilihat ada atau tidak transaksinya. Kalau punya catatan rekeningnya, kan, bisa dilihat apa yang bisa disembunyikan atau dimanipulasi. Kalau ada aktivitas, tentu harus melapor ke Direktorat Jenderal Pajak.

Kabarnya, Anda melibatkan cukup banyak purnawirawan TNI dalam berbisnis?

Ya, saya beruntung. Mereka itu setelah pensiun kan tidak ada kegiatan apa-apa, makanya saya ajak.

Bisnis Anda dengan Presiden Jokowi masih berlanjut?

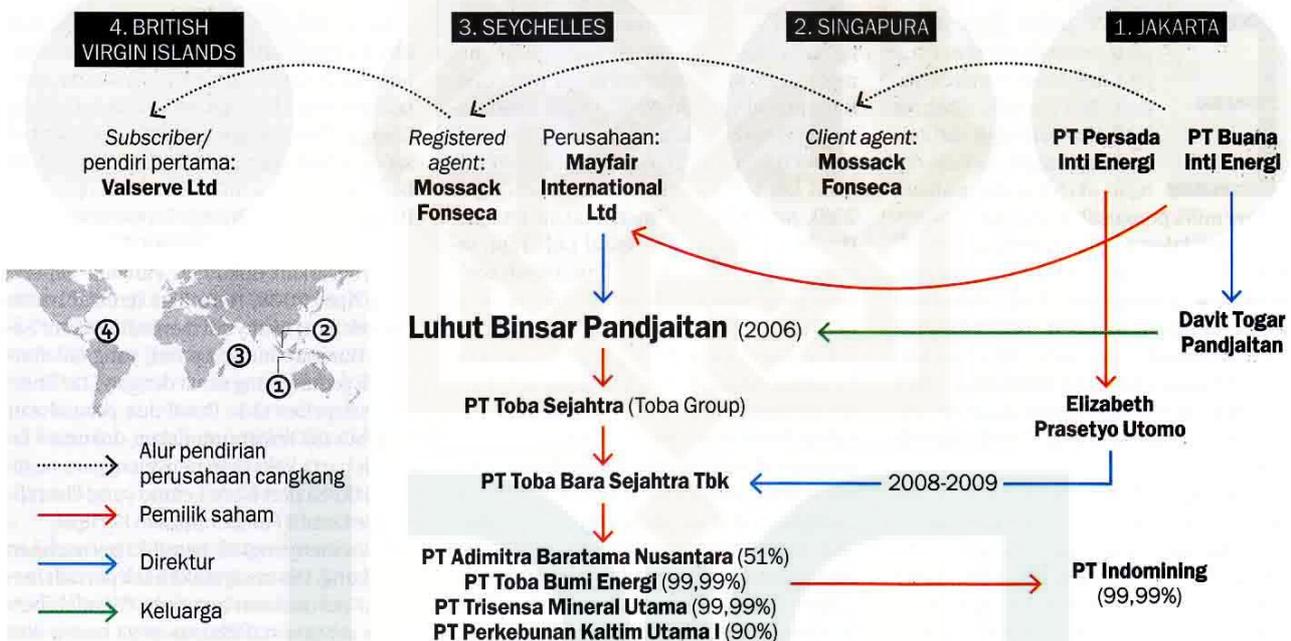
Rakabumi Sejahtera. Waktu itu, Pak Jokowi masih jadi Wali Kota Solo. Sekarang makin bagus. Ekspornya makin naik.

Untungnya besar?

Tidak usah dituliskan. Itu rahasia perusahaan. Pak Jokowi itu sederhana dari dulu. Dia sudah *happy* dengan untung *segitu*. ●

TERSEMBUNYI DI TENGAH SAMUDRA

Tepat sepuluh tahun lalu nama Luhut Binsar Pandjaitan muncul di Republik Seychelles, negara kepulauan di tengah Samudra Hindia—sekitar 930 mil dari garis pantai daratan Afrika bagian timur. Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini ditunjuk sebagai direktur tunggal oleh dua perusahaan di Jakarta yang mendirikan Mayfair International Ltd di Victoria, ibu kota Seychelles, lewat jasa Mossack Fonseca. Tapi Luhut mengatakan tak pernah mengenal perusahaan ini.



MENGA PA SEYCHELLES?

Layanan Republik Seychelles memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan banyak negara suaka pajak lain.

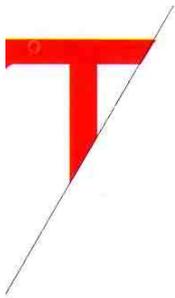
- Bebas pajak.
- Kerahasiaan terjamin. Seychelles tak punya kerja sama pertukaran informasi dengan negara lain ataupun organisasi internasional.
- Cukup 24 jam proses mendaftarkan pendirian perusahaan.
- Biaya pendaftaran US\$ 100.
- Tak ada batasan minimum ataupun maksimum modal disetor.
- Tak ada kewajiban melaporkan pemilik sebenarnya atau *beneficial owner*.

SERATUS KALI LIPAT

Luhut dua kali melaporkan hartanya sebagai penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama pada 2001, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dan terakhir medio tahun lalu, saat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. "Tiba-tiba saja harga batu bara meledak, US\$ 30, ada juga yang US\$ 40. Itu *hands of God*," katanya mengenai kesuksesan usahanya, yang dirintis pada 2004.

10 MEI 2001
Rp 7,1 miliar
 US\$ 295 ribu

19 JUNI 2015
Rp 660 miliar
 US\$ 7,3 juta



ORANG KITA DI GEDUNG AKARA

Sejumlah nama politikus dan pejabat publik tersangkut Panama Papers.
Daftar perusahaan cangkang mereka di kawasan suaka pajak tak dilaporkan ke KPK.

EMPAT puluh lima dokumen terserak di antara 11,5 juta dokumen Panama Papers. Jika dicetak, tebalnya lebih dari setengah rim kertas. Semuanya terkait dengan aktivitas perusahaan *offshore* milik pengusaha Edi Yosfi.

Ada setidaknya empat perusahaan di berkas Panama yang terkait dengan Edi: Saxenburg Enterprises Ltd, Palomino Energy Ketapang Limited, Hollingsworth Group Ltd, dan Kingswood Capital Ltd. Empat perusahaan tersebut didaftarkan oleh firma hukum Mossack Fonseca dan beralamat sama: Akara Building, Tortola, British Virgin Islands.

Dihubungi pada Kamis pekan lalu, Edi enggan berkomentar tentang aktivitasnya di perusahaan cangkang tersebut. "Saya sedang umrah," kata Komisaris Utama PT Adiperkasa Citra Lestari ini kepada *Tempo*, Kamis pekan lalu. Awal April lalu, Edi, yang dikenal dekat dengan petinggi Partai Amanat Nasional semisal Hatta Rajasa dan Amien Rais, membenarkan pernah terdaftar sebagai pemilik perusahaan. "Dulu memang pernah bikin untuk beli perusahaan, di sana, tapi tidak jadi," katanya. "Kami sudah tutup juga perusahaan tersebut sekitar 2008-2009."

Nyatanya, dokumen yang diperoleh *Tempo* menunjukkan bahwa aktivitas Edi terekam sejak 2005 hingga 2013. Pada Juli 2005, misalnya, Edi dalam surat yang ditujukan ke Saxenburg Enterprises Ltd menyatakan dirinya sebagai direktur tunggal perusahaan tersebut. Dia tercatat memiliki 50 ribu lembar saham, masing-masing senilai US\$1.

Sedangkan pada 2013, Edi, dalam surat

berjudul "resolusi direktur tunggal", menyatakan agen yang mewakili perusahaannya untuk mengurus berbagai persoalan hukum dialihkan ke MMG Trust. Tanda tangan Edi tercatat jelas di situ.

Uniknya, beberapa aktivitas di perusahaan Edi terbilang superkilat. Pada 9 Juli 2010, misalnya, Edi menyatakan menjadi Direktur Kingswood Capital Ltd. Tapi, selang beberapa saat kemudian, masih pada hari yang sama, Edi mengirimkan surat pengunduran diri sebagai direktur.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pebisnis tak melulu melakukan kejahatan dengan mendirikan perusahaan di negara yang menjadi suaka pajak. Ada kemungkinan pengusaha memang menggelar aksi korporasi biasa. "Meskipun bisa juga untuk menghindari pajak atau menyembunyikan aset dari kegiatan ilegal seperti korupsi," kata Yustinus. "Dua kegiatan itu paling sering menjadi modus."

DOKUMEN Panama Papers penuh dengan data tentang aktivitas lebih dari 200 ribu perusahaan cangkang yang didirikan firma hukum Mossack Fonseca. Dokumen yang diperoleh oleh surat kabar Jerman *Suddeutsche Zeitung* tersebut kemudian diinvestigasi oleh organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists, yang bekerja sama dengan hampir 400 jurnalis dari seluruh dunia, termasuk wartawan *Tempo* di Indonesia. Dari penelusuran sejak Agustus tahun lalu, *Tempo* menemukan tak kurang dari 899 nama politikus, pejabat, ataupun pengusaha negeri ini dalam pendirian perusahaan di negara suaka pajak.

Heru Lelono, misalnya. Anggota staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 hingga 2014 ini tercatat menjadi direktur di perusahaan cangkang Star Energy Enterprises Ltd, dengan alamat sama seperti perusahaan Edi Yosfi. Heru berbagi saham senilai US\$100 dengan Itek Bachtiar dan Iswahyudi. Tanda tangan mereka tertoreh pada 10 Mei 2007.

Berdasarkan dokumen Panama Papers, pada April 2008, Heru juga tercatat bersama Itek dan Iswahyudi menjadi Direktur Sarana Harapan Indocorp Ltd, yang didaftarkan di gedung yang sama dengan Star Energy Enterprises Ltd. Ihwal dua perusahaan tersebut tak tercantum dalam dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari Heru Lelono yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Heru menyangkal memiliki perusahaan cangkang. Dia menyatakan tak pernah memiliki perusahaan apa pun. "Setelah bertugas sebagai staf khusus, saya hanya ikut usaha dengan teman di Madiun, PT Mitra Maharta, yang membuat mesin pemanen padi," ujar Heru melalui pesan pendek. Heru meyakini namanya dicatut untuk pendirian perusahaan di Gedung Akara tersebut.

Meski begitu, dia mengaku mengenal Itek dan Iswahyudi. "Kalau tidak salah, mereka agen konsultan perminyakan." Iswahyudi, kata Heru, pernah juga menjadi asisten staf khusus di Istana. Sejak tak aktif di lingkungan kekuasaan, bekas Komisaris BRI tersebut menyatakan tak pernah lagi berkomunikasi dengan Itek dan Iswahyudi.

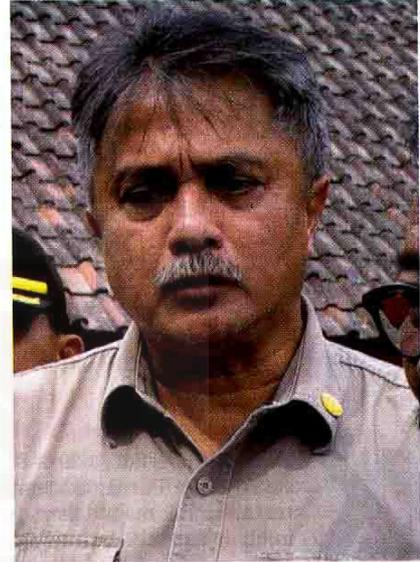
Itek belum bisa dimintai tanggapan. *Tempo* mendatangi kantornya di Plaza Bapindo, Jalan Sudirman, Jakarta. Tapi petugas di sana menyatakan Itek sudah pindah



Muhammad Reza Ihsan Rajasa



Edi Yosfi



Heru Lelono

kantor. Sedangkan Iswahyudi tak lagi tinggal di alamat yang tertera di perusahaan cangkang. Saat *Tempo* mendatangi rumahnya di Jati Sampurna, Bekasi, Widodo, pemilik rumah, mengatakan Iswahyudi pindah ke Garut, Jawa Barat, sejak tiga tahun lalu.

Selain Heru Lelono, tercatat nama Banyu Biru Djarot di Panama Papers. Putra politikus Erros Djarot yang juga aktif menjadi relawan pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini terdaftar sebagai direktur dua perusahaan cangkang. Bukan hanya tanda tangan, salinan paspor Banyu Biru pun muncul dalam Panama Papers.

Pada 11 Maret 2014, Banyu Biru menjadi direktur di MSP Holdings Ltd. Tiga tahun sebelumnya, dia menjadi Direktur Ramba Energy Indonesia Limited. Dua perusahaan itu beralamat di Akara Building, Tortola, British Virgin Islands. Banyu Biru tak menjawab telepon ataupun pesan pendek permintaan wawancara *Tempo*.

Nama lain yang juga tercatat menjadi direktur di perusahaan yang berkantor di Gedung Akara adalah Muhammad Reza Ihsan Rajasa. Dia menyatakan sebagai direktur perusahaan Hazel Century Limited pada 15 Mei 2012, dengan sahamnya seharga US\$ 1. Kala itu, ayah Reza, Hatta Rajasa, menjabat Menteri Koordinator Perekonomian.

Tapi kepemilikan perusahaan cangkang di luar negeri ini tak tercantum dalam LHKPN yang diserahkan Hatta ke KPK.

Pada hari yang sama, Hazel Century juga menyatakan menjadi pemilik saham dari Dovela Inaurate Inc, yang juga berkantor di Akara. Dalam dokumen tersebut tercantum tanda tangan Reza Rajasa. Reza mengatakan semula Hazel Century Limited didirikan untuk mengundang investor dari luar negeri. Saat itu, perusahaan jasa kontraktor pengeboran minyak dan gas bumi miliknya juga mencari peluang pengeboran di luar negeri.

Menurut Reza, perusahaan tersebut tak pernah mendapat peluang di luar negeri. "Hazel Century tak pernah aktif sejak berdiri. Tak ada aktivitas apa pun," katanya melalui pesan pendek. Dia membantah kabar bahwa perusahaan cangkang tersebut didirikan untuk menghindari pajak.

Dibandingkan dengan Reza dan Banyu Biru, jejak anak sulung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Anindya Novyan Bakrie, jauh lebih awal soal urusan mendirikan perusahaan cangkang. Chief Executive Officer PT Bakrie Global Ventura tersebut terdaftar di Serenata Shipping Limited SA, yang beralamat di Panama, pada Desember 2004. Saat itu Aburizal menjabat Menteri Koordinator Perekonomian di ka-

binet Yudhoyono. Ihwal ini tak dicantumkan dalam LHKPN Aburizal.

Jabatan untuk Anindya Bakrie di situ adalah direktur dan presiden. Saat itu usianya masih 30 tahun dan menjabat Presiden Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi. Tak jelas benar aktivitas yang dilakukan perusahaan yang didirikan pada akhir 1982 tersebut. Informasi yang tersedia di dokumen Panama ataupun Internet pun minim. Belakangan, nama Anindya tak muncul lagi sebagai direktur di perusahaan tersebut.

Anindya belum bisa dimintai tanggapan. Dia tak membalas pesan yang dilayangkan *Tempo*. Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, mengklaim tak ada yang salah dengan langkah Anindya mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri. Menurut Lalu Mara, kegiatan Presiden Komisaris PT Bakrie Telecom Tbk itu hanya aktivitas bisnis biasa. "Tahun 2004 kan Bakrie Group masih mencari uang. Nah, perusahaan itu untuk menarik dana dari luar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Golkar ini.

Lalu Mara membantah tuduhan bahwa perusahaan cangkang tersebut untuk menghindari pajak yang tinggi. "Jangan curiga terus sama pengusaha. Peran kami besar untuk membangun ekonomi negeri ini," katanya. ●

CURRICULUM VITAE

	Identitas Pribadi
	Nama : Anis Amalia Alamat : Sapen GK I/ 457, RT/W 026/008 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta No. Hp : 085624579715 E-mail : anisamalia.official@gmail.com TTL : Purworejo, 17 Juli 1994 Gender : Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan Formal

- 2012 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Program Studi S1 Ilmu Komunikasi)
- 2009 – 2012 : SMA Negeri 2 Purworejo
- 2006 – 2009 : SMP Negeri 3 Purworejo
- 2000 – 2006 : SD Negeri Tanjungrejo
- 1999 – 2000 : TK Mekar Tanjungrejo

Aktivitas Saat Ini

Mahasiswa aktif program studi Ilmu Komunikasi (konsentrasi Public Relations) semester 8 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

Kemampuan

- Mengoperasikan komputer (Ms. Word, Ms. Excel, Power Point, dan Publisher)
- MC acara formal maupun non formal
- Kepenulisan (membuat liputan, press release dan content writing)
- Mengoperasikan beberapa social media (blog, twitter, instagram, tumblr, facebook)
- Berbahasa Inggris aktif maupun pasif
- Fotografi dokumentasi

Pengalaman Organisasi

- 2015 : Peserta Job Training di divisi Public Relations PT. Kereta Api Indonesia (Kantor Pusat)
- 2014 – sekarang : Anggota gerakan SPAK ! (Saya, Perempuan Anti Korupsi !) daerah Yogyakarta
- 2013 – 2014 : Pengurus Bidang Keperempuanan “Aisyah” PMII Humaniora Park Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga
- 2013 – 2014 : Divisi Pengembangan Minat & Bakat BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

- 2013 – 2014 : Bendahara dan Redaktur “Buletin FISH” Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga
- 2014 : Marketing Macan Kampus Tour and Travel
- 2014 : Crew Crayon Event Organizer

Pengalaman Kepanitiaan

- 2015**
- Pelatihan Keuangan Aparatur Desa (PKAD) oleh Kemendagri dan BPPM DIY
 - Training for Trainer Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK!) oleh KPK dan Australian-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)
 - Gelar Budaya Kalijaga oleh Crayon Event Organizer
 - Gelar Budaya Indonesia oleh PMII Humaniora Park UIN Sunan Kalijaga
 - Fasilitator Pelatihan Kader Dasar (PKD) 2014 PMII Humaniora Park UIN Sunan Kalijaga
- 2014**
- Seminar Nasional “Saya, Perempuan Anti Korupsi!” oleh KPK
 - Festival Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2014 oleh KPK
 - Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh The Indonesian’s View (TIV)
 - Seminar Nasional “Keadilan Sosial Perspektif Murtadha Muthahhari” oleh BEM UIN Sunan Kalijaga
 - Dialog Kebangsaan bersama Drs.H. Sidarto Danusubroto (Ketua MPR RI)
 - Talkshow “Peringatan 16 Tahun Reformasi” oleh BEM UIN Sunan Kalijaga

- Bedah Buku “Hoegeng” oleh BEM UIN Sunan Kalijaga
- Launching Website Humaniora Park oleh PMII Humaniora Park UIN Sunan Kalijaga
- Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2014 UIN Sunan Kalijaga
- Fasilitator Pelatihan Kader Dasar (PKD) 2014 PMII Humaniora Park UIN Sunan Kalijaga

2013

- Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2013 UIN Sunan Kalijaga
- Sie. KSK Pelatihan Kader Dasar (PKD) 2013 PMII Humaniora Park UIN Sunan Kalijaga

